

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menjalankan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Pemberian hak otonomi daerah membuat pemerintah daerah dapat menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun dalam rangka menjalankan kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan perekonomian sebagai bukti keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kemudian diukur dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja sangat diperlukan dalam melihat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas tidak sekedar menunjukkan kemampuan daerah dalam membelanjakan uang publik, akan tetapi termasuk kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Nugraha, 2017)

Dengan demikian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat diukur dengan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan

membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Sudaryo,2017).

Selain analisis rasio, efektifitas dan efisien belanja oleh instansi pemerintah selalu menjadi kajian dalam hal pengukuran kinerja sebuah instansi. Dalam penganggaran pemerintah belanja dimasukkan kedalam dua kategori besar, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan daerah. Belanja langsung berkaitan dengan investasi pemerintah yang berimplikasi langsung pada kepentingan rakyat. Semakin besar alokasi belanja langsung dalam APBD, akan semakin mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kristiyanto, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, pengaruh belanja terhadap penganggaran akan lebih diperhatikan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Terutama belanja langsung yang memiliki rutinitas dalam keseharian realisasi penganggaran dan memiliki jumlah yang relatif lebih banyak untuk dianggarkan disamping kebutuhan terhadap belanja tidak langsung ataupun pembiayaan lainnya. Pengukuran kinerja keuangan mengenai belanja langsung bisa dinilai kesuksesan dalam mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien dan relatif melalui analisis rasio keuangan.

Dengan pengukuran menggunakan rasio keuangan diharapkan pemerintah daerah selaku pihak yang merealisasikan APBD dapat menjadikan rasio keuangan

sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah agar kedepannya pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam menyerap anggaran dan bijak dalam menganggarkan pengeluaran dan belanja sehingga tercapai pemerintah yang berkembang, pembangunan berstandar yang baik dan pelayanan masyarakat sesuai kriteria yang baik.

Bagi kabupaten Agam yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, maka tidak akan menjadi masalah untuk mengeluarkan belanja langsung yang tinggi pula guna menjalankan semua program peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah diperlukan kinerja yang baik dari pemerintah, agar PAD yang ada dapat tersalurkan dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

PDAM Kabupaten Agam sebagaisalah satu perusahaan daerah yang di kelola oleh pemerintah daerah yang melakukan administrasi belanja pegawai. Oleh karena itu masalah administrasi pembayaran belanja pegawai PDAM Kabupaten Agam perlu penanganan sebagaimana mestinya terutama hal hal yang berkaitan dengan prosedur pembayaran belanja pegawai daerah.

Mengenai masalah distribusi belanja pegawai pada Kantor PDAM Agam penulis ingin melihat bagaimana keadaan kesejahteraan para pegawai dan sistem upah/gaji yang ada di PDAM Kab Agam. Dari uraian diatas penulis mengangkat judul **“Prosedur Belanja pegawai pada Kantor PDAM Kabupaten Agam”**.

1.2 Rumusan Masalah

PDAM Kabupaten Agam sebagai salah satu perusahaan daerah yang di kelola oleh pemerintah daerah yang melakukan administrasi belanja pegawai. Oleh karena itu masalah administrasi pembayaran belanja pegawai PDAM Kabupaten Agam perlu penanganan sebagaimana mestinya terutama hal hal yang berkaitan dengan prosedur pembayaran belanja pegawai daerah. Dari uraian diatas penulis merumuskan masalah

1. Bagaimana Distribusi Belanja Pegawai Pada Kantor PDAM Kab.Agam
2. Bagaimana Prosedur Belanja Pegawai Pada Kantor PDAM Kab. Agam

1.3 Tujuan Magang

a. Tujuan Umum

1. Memberi pengalaman kerja kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam kerja lapangan pada instansi pemerintah.
2. Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap dunia kerja berupa pengaplikasian ilmu terhadap kegiatan yang dilakukan.
3. Mahasiswa dapat mempelajari fakta-fakta dalam pengelolaan belanja pegawai khususnya prosedur pembayaran atau pencairan belanja pegawai.

4. Memperkenalkan mahasiswa yang sedang menjalani kegiatan magang pada dunia kerja sehingga memiliki wawasan dan memotivasi diri untuk masa depan
5. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studibjurusan keuangan negara dan daerah Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

b. Tujuan Khusus

1. Mengkaji distribusi belanja pegawai pada kantor PDAM Kab. Agam
2. Mengkaji prosedurbelanjapegawai pada kantor PDAM Kab. Agam

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaatdari kegiatan magang ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian melalui pemahaman akan budaya kerja profesional yang menuntut kerja sama, tepat waktu, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
2. Mempersiapkan mental yang kuat dan pengetahuan yang memadai untuk memasuki dunia kerja.
3. Membangun jaringan kerja dengan karyawan di perusahaan tempat kegiatan magang.

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

1. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
2. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan magang.

3. Membantu meringankan tugas-tugas karyawan di PDAM Kabupaten Agam

1.5 Tempat Magang dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Antokan Kabupaten Agam. PDAM Kabupaten Agam ini beralamat di Jalan Dr. Muhamad Hatta No. 531 Lubuk Basung. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 hari kerja yang dimulai dari tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019. Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan dengan ketentuan pada jam kerja menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

1.6 Data yang dibutuhkan

Beberapa data yang penulis butuhkan yaitu data Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam, visi misi PDAM Kab. Agam, prosedur belanja pegawai Kab. Agam.

1.7 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

- a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini diperlukan untuk mengumpulkan jumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi belanja pegawai PDAM Kab. Agam

- b. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara ini pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan sebagai pedoman

mengumpulkan data. Wawancara ini penulis lakukan dengan staff administrasi/keuangan guna mengumpulkan data tentang prosedur belanja pegawai PDAM Kab. Agam.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku dan sumber lain. Penulis memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan internet guna mendapatkan informasinya.



1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan laporan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, waktu dan tempat magang dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori dan konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam prosedur belanja pegawai.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR

Gambaran umum tentang PDAM Kabupaten Agam, sejarah berdirinya, visi dan misi instansi terkait, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam PDAM Kabupaten Agam.

BAB IV PEMBAHASAN

Menguraikan tentang “Prosedur Belanja Pegawai pada PDAM Kabupaten Agam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk perbaikan dan perubahan di masa yang akan datang.

